

**SKRIPSI**  
**UPAYA POLDA KALIMANTAN SELATAN DALAM**  
**PENANGGULANGAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA MELALUI**  
**SUNGAI**



**Disusun oleh :**

**WINEY CHRISNANTI SINAGA**

**NPM : 11 05 10560**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa Hukum**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2015**

**SKRIPSI**  
**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**UPAYA POLDA KALIMANTAN SELATAN DALAM**  
**PENANGGULANGAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA MELALUI**  
**SUNGAI**

Diajukan oleh :

**WINEY CHRISNANTI SINAGA**

**NPM : 11 05 10560**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum**

Telah disetujui

Oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 19 Mei 2015

Dosen Pembimbing,



**Dr. G Widiartana, S.H., M. Hum**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**SKRIPSI**  
**UPAYA POLDA KALIMANTAN SELATAN DALAM**  
**PENANGGULANGAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA MELALUI**  
**SUNGAI**



Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik Yang Diselenggarakan pada:

**Hari : Senin**  
**Tempat : Ruang Sidang Skripsi**  
**Tanggal : 15 Juni 2015**

**Susunan Tim Penguji**

**Ketua : Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum**  
**Sekretaris : Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum**  
**Anggota : P. Prasetyo Sidi Purnomo, S.H., M.S**

**Tanda Tangan**

.....  
.....  
.....

**Mengesahkan**



.....  
**Endro Susilo, S.H., L. LM**

## HALAMAN MOTTO

Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur.

( Filipi 4: 6 )

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

**PENULISAN HUKUM INI / SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN**

**KEPADA:**

- ***TUHAN YESUS KRISTUS YANG BEKERJA LUAR BIASA DALAM  
HIDUP SAYA***
- ***PAPA ( D.R. SINAGA )***
- ***MAMA ( LATIANA.U )***
- ***SAUDARA KANDUNG SAYA (CHRISTIAN SINAGA DAN NIKHO  
HALOMOAN SINAGA)***
- ***ITAK (NENEK) SAYA***
- ***SAUDARA IPAR SAYA (ARU VILLOSA DAN DANIA RELINA  
SITOMPUL)***
- ***KEPONAKAN ( TALENDO PARULIAN SINAGA DAN MALVYN  
NICHOLAS SINAGA )***
- ***DAN SEMUA TEMAN-TEMAN YANG TELAH MENDUKUNG DAN  
MEMBANTU SAYA***

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum/Skripsi ini merupakan hasil karya penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum/Skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya orang lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 19 Mei 2015

Yang menyatakan,

Winey Chrisnanti Sinaga

## **ABSTRACT**

Drug abuse is a problem in society despite eradication efforts have been done continuously. South Borneo as a province that has a region with a lot of rivers, both small rivers and large rivers become one of the areas with the highest rate of illicit trafficking in Indonesia. Many rivers utilized as an exit and entry of illicit goods. This is what makes the writer interested in lift the title South Kalimantan Police efforts in combating illicit trafficking, the problem is how the efforts made by South Borneo Police in dealing with illicit trafficking of narcotic drugs and what obstacles encountered. The method used is empirical legal research methods. After conducting the research, it is known that in conducting illicit trafficking countermeasures South Borneo Police conduct preventive and repressive efforts, while obstacles encountered consist of external and internal obstacles. As a suggestion from South Borneo Police, the writer should take measures to minimize the difficulties in implementing countermeasures illicit trafficking in South Borneo so that it can be eradicated completely.

Keywords :. Police, Countermeasures, Illicit, Narcotics.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan judul, **“UPAYA POLDA KALIMANTAN SELATAN DALAM MENANGGULANGI PEREDARAN GELAP NARKOTIKA”** sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta tepat pada waktunya. Disadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan hukum ini banyak mendapatkan uluran tangan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus untuk kasih-Mu yang luar biasa dalam hidupku.
2. Yang tercinta Papa ( D.R. Sinaga ) dan Mama ( Latiana Ubik ) yang dengan tulus hati, pengorbanan, cinta dan kasihnya, serta doa yang tidak henti-hentinya dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya
3. Abang saya ( Christian Sinaga dan Nikho Halomoan Sinaga ), kakak ipar saya ( Aru Villosa dan Dania Relina Sitompul ), Itak (nenek) ku yang gaul dan Keponakan saya ( Talendo Parulian Sinaga dan Malvyn ) yang selalu memberikan dukungan moral dan materi kepada saya.
4. FX. Endro Susilo, S.H., LL.M Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
5. Dosen Pembimbing Penulisan Hukum/Skripsi Penulis ( Dr. G. Widiartana, SH.,M.Hum ) yang telah membimbing Penulis dalam menyelesaikan



Penulisan Hukum/Skripsi.

6. Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum, P. Prasetyo Sidi Purnomo, S.H., M.S selaku dosen penguji skripsi yang memberikan kritik dan saran.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
8. Seluruh Staff Administrasi, Staff Pengajar, Staff Perpustakaan, Staff Laboratorium, Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta.
9. Bapak AKBP Agus Durijanto, S.H., M.H, AKP Charles Tampubolon, S.H., S.IK, Bripka Subroto Rindang A.S dan Bripka Ajat Sudrajat selaku narasumber bagi penulis sehingga penulisan dapat berjalan dengan lancar menyelesaikan skripsi.
10. Ebenezer Sitinjak, S.H yang telah memberikan dukungan dan selalu mengingatkan saya dalam menyelesaikan penulisan ini.
11. Septi Darniati Ndraha, S.E yang selalu memberikan dukungan kepada saya dalam menyelesaikan penulisan ini.
12. Bripda Naomi Agustina Simatupang yang telah membantu saya dalam melakukan penelitian di Polda Kalimantan Selatan.
13. Riri, Ochi, Oni, Echa, Felinsa, Dicky, Bekti, Openk, Wira, Dwi, Peni, Neka, Uul, Frizki, Mas Risma, Sofiadina, Tia, Liena, bang Welly yang telah memberikan saya dukungan
14. Meita Sinaga, Desy Butar Butar, Rika Sinaga, Diana Katiandagho, yang menjadi saudara saya di Jogja
15. Kumpulan marga Toga Sinaga dan Ikatan Muda Mudi PPTSB Yogyakarta

yang sudah menjadi keluarga baru saya di Yogyakarta.

16. Dita, Aven, Stella, Meli, Tesa, Vina, dan teman-teman kost pringgodani lainnya yang selama 4 tahun bersama dengan saya.
17. Bang Ucok Nainggolan, Kak Dewi Sidauruk, Bang Rean Ginting yang setia menemani saya saat mengerjakan skripsi.
18. Teman-teman tim basket Rechter yang mendukung saya.
19. Anak-anak PNB Banjarbaru yang telah memberi dukungan kepada saya.
20. Teman-teman UAJY yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang juga selalu memberikan dukungan, semangat, serta doa bagi penulis.
21. Teman-teman yang ada di PERMABA yang juga selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis.
22. Teman – teman KKN kelompok 46 Pedukuhan Summersari, Indri, Bentar, Yoha, Ansar, Rian, Krisman, Adit yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis.
23. Teman – teman angkatan 2011 fakultas hukum atma jaya yogyakarta yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
24. Teman – teman bermain penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Adapun dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan adanya masukan, kritik, dan saran yang dapat membangun bagi skripsi ini. Akhirnya penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas dukungan, doa dan semangat yang diberikan. Penulis

berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan  
semua pihak.

Yogyakarta, 19 Mei 2015

Penulis,

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL.....i

HALAMAN PERSETUJUAN.....ii

HALAMAN PENGESAHAN .....iii

HALAMAN MOTTO.....iv

HALAMAN PERSEMBAHAN.....v

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....vi

ABSTRACT.....vii

KATA PENGANTAR.....viii

DAFTAR ISI.....ix

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah.....1

B. Rumusan masalah.....4

C. Tujuan penelitian.....5

D. Manfaat penelitian.

1. Manfaat teoritis.....5

2. Manfaat praktis

a. Bagi aparat penegak hukum.....5

b. Bagi masyarakat.....5

c. Bagi penulis.....5

E. Keaslian penelitian.....6

F. Batasan konsep.....	11
G. Metode penelitian	
1. Jenis penelitian.....	12
2. Sumber data.....	12
3. Metode pengumpulan data.....	12
4. Lokasi penelitian.....	13
5. Narasumber.....	13
6. Analisis Data.....	13
H. Sistematika Skripsi.....	14

## BAB II: PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA

A. Tinjauan umum tentang narkotika.....	15
1. Pengertian narkotika.....	15
2. Penggolongan narkotika.....	16
3. Dampak negatif penyalahgunaan narkotika.....	27
4. Tanda-tanda pemakai narkotika.....	31
5. Peredaran gelap narkotika.....	32
B. Tugas dan wewenang Polri dalam penanggulangan peredaran gelap narkotika.....	34
1. Pengertian Polisi.....	35
2. Fungsi Polisi.....	35
3. Tugas dan wewenang Polisi.....	35
C. Penanggulangan peredaran gelap narkotika oleh Polda	

Kalsel.....	37
1. Upaya Polda Kalimantan Selatan dalam menanggulangi peredaran gelap narkoba.....	40
2. Kendala yang dihadapi oleh Polda Kalimantan Selatan dalam penanggulangan peredaran gelap narkoba.....	45
BAB III :PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	48
B. Saran.....	49
DAFTAR PUSTAKA.....	50

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Saat ini peredaran gelap narkoba di Indonesia semakin meningkat. Narkoba sendiri merupakan yang sulit untuk didapat, melainkan barang yang sudah mudah di dapat karena kebutuhan sesaat sebagai efek candu dan kenikmatan tubuh penggunanya. Pecandu narkoba akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan barang haram ini karena narkoba memang suatu zat yang memiliki efek candu yang kuat bagi penggunanya dan efek ketergantungan yang luar biasa. Ketergantungan yang dialami pemakai narkoba ini jika tidak terealisasi maka efek efek yang dialami adalah sakaw, yaitu keadaan dimana orang tersebut mengalami rasa gelisah atau gangguan psikis atau psikologis akibat kecanduan putau.<sup>1</sup>

Fenomena penyalahgunaan narkoba memang menjadi salah satu masalah dalam masyarakat. Pemberantasan tindak pidana narkoba sampai sekarang terus dilakukan meskipun sangat sulit atau bahkan dapat dikatakan tidak bisa dihapus sama sekali dari muka bumi, maka yang dapat dilakukan secara realistis adalah menekan atau mengendalikan peredaran gelap serta penyalahgunaan narkoba tersebut.

---

<sup>1</sup> Heriady willy, *Berantas Narkoba Tak Cukup Hanya Bicara – (Tanya Jawab dan Opini)*, UII Press, Yogyakarta, 2005, hal. 70.

Salah satu kota yang sering dimasuki dengan mudah oleh para pengedar adalah provinsi Kalimantan Selatan, bila dilihat dari kasus narkoba yang berhasil diungkap oleh kepolisian Provinsi Kalimantan Selatan berada pada peringkat ke-5 terbanyak dari seluruh provinsi di Indonesia.<sup>2</sup> Banjarmasin adalah ibu kota sekaligus jantung Provinsi Kalimantan Selatan. Kota ini tak terpisah dengan keberadaan sungai atau kanal serupa labirin sehingga tak ayal dijuluki “Kota Seribu Sungai”. Dari zaman dulu hingga sekarang, Banjarmasin merupakan kota pelabuhan penting di Kalimantan.<sup>3</sup> Kondisi geografis dengan banyak sungai tersebut memudahkan masuknya narkoba ke kota Banjarmasin.

Peredaran narkoba di Kota Banjarmasin yang semakin hari semakin meningkat. Dalam waktu sepuluh hari, yaitu pada 13 hingga 22 Mei 2014, jajaran Polda Kalsel menjaring sebanyak 115 kasus melibatkan 125 orang tersangka. Dari para tersangka tersebut, aparat keamanan mengamankan barang bukti berupa 57 butir ekstasi, 335 gram sabu, 8.914 butir obat-obatan golongan IV, 22 botol minuman keras dan 295 liter tuak.<sup>4</sup>

Secara umum permasalahan narkoba dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yang saling terkait, yakni:<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Narasumber Bapak AKBP Agus Duriyanto, Pada Tanggal 6 April 2015.

<sup>3</sup> <http://www.indonesia.travel/id/destination/914/banjarmasin>. Diakses pada tanggal 12 november 2014

<sup>4</sup> <http://antarakalsel.com/berita/18399/kasus-narkoba-di-kalsel-meningkat>. Diakses pada tanggal 12 november 2014

<sup>5</sup> <http://www.solusihukum.com>



1. Adanya produksi narkoba secara gelap (*illicit drug production*).
2. Adanya perdagangan gelap narkoba (*illicit drug trafficking*).
3. Adanya penyalahgunaan narkoba (*drug abuse*).

Secara lebih konkrit masalah-masalah yang dihadapi terkait dengan narkoba meliputi:<sup>6</sup>

1. Bahaya penyalahgunaan narkoba bagi kehidupan manusia, akan mengancam kualitas hidup manusia baik secara fisik, mental, emosional maupun kecerdasan bahkan tidak jarang jiwanya melayang.
2. Dalam kelompok masyarakat, penyalahgunaan narkoba akan mengancam dan mengganggu kelangsungan hidup dan ketahanan keluarga, masyarakat dan bangsa. Hal ini sangat mencemaskan karena akan menghancurkan masa depan dan kelangsungan hidup bangsa.
3. Upaya yang bersifat preventif atau mencegah harus dilaksanakan secara sinergis dan terpadu.
4. Pengetahuan masyarakat tentang bahaya narkoba masih sangat rendah untuk itu perlu dilakukan sosialisasi disegala unsur masyarakat dan dilakukan dengan pendekatan yang tepat.
5. Penyebaran HIV/AIDS saat ini semakin memprihatinkan, kenaikan jumlah kasus baru yang tertular meningkat tajam. Penularan melalui hubungan seksual yang tidak aman merupakan cara penularan tertinggi, disusul dengan cara melalui narkoba dengan jarum suntik.
6. Penggunaan narkoba dari tahun ke tahun semakin bertambah. Fenomena ini merupakan fenomena gunung es yang tampak dipermukaan lebih kecil dibandingkan dengan yang tidak tampak.
7. Peredaran narkoba secara gelap telah berkembang secara cepat, tidak mengenal batas negara, apalagi batas daerah domestik dalam arti dimana-mana hampir bisa dipastikan ada narkoba, disekolah, dikampus, dikantor, direstoran, dirumah apalagi di tempat hiburan.
8. Sasaran yang harus dicapai adalah memutus jaringan peredaran psikotropika, menurunkan tingkat permintaan psikotropika, menurunkan tingkat penyalahgunaan psikotropika, menurunkan kriminalitas yang berkaitan dengan penyalahgunaan psikotropika dan meningkatkan kekebalan/daya tangkal dan daya cegah masyarakat terhadap psikotropika.

---

<sup>6</sup> <http://www.menegpp.go.id>, Diakses Pada Tanggal 12 November 2014.

9. Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba sampai saat ini belum memuaskan baik dari sudut pencegahan, terapi maupun rehabilitasi. Angka kekambungan masih tinggi 43,9% dan penyakit penyalahgunaan narkoba merupakan penyakit kronik yang berulang kali kambuh merupakan proses gangguan mental adiktif.
10. Sosialisasi bahaya psikotropika sudah sering dilakukan, persoalannya bukan pada aparat yang tidak peduli, namun penegakan hukum yang masih lemah sehingga masih banyak pengedar dan pengguna dapat bebas dari hukum.
11. Komitmen bersama untuk membuat jaringan yang lebih terpadu dan akurat yaitu dengan melakukan aksi nyata dalam menangani penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba masih lemah.
12. Permasalahan HIV/AIDS merupakan masalah yang krusial. Jumlah kasus yang terekam terus meningkat secara signifikan.

Berdasarkan berbagai permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka timbul keinginan dari penulis untuk mengetahui lebih mendalam lagi mengenai penanggulangan terhadap peredaran gelap narkoba yang dilakukan melalui jalur transportasi sungai di wilayah Banjarmasin. Dalam hal ini penulis merasa tertarik untuk memilih judul “Upaya Polda Kalimantan Selatan Dalam Penanggulangan Peredaran Gelap Narkoba Melalui Sungai”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh Polda Kalimantan Selatan untuk menanggulangi peredaran gelap narkoba melalui sungai ?
2. Apa kendala yang dihadapi oleh Polda Kalimantan Selatan dalam menanggulangi peredaran gelap narkoba melalui sungai ?

### **C. Tujuan penelitian**

1. Untuk mengetahui upaya Polda Kalimantan Selatan dalam menanggulangi peredaran gelap narkoba melalui sungai.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Polda Kalimantan Selatan dalam menanggulangi peredaran gelap narkoba melalui sungai.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan ilmu hukum, khususnya ilmu hukum pidana di Kalimantan Selatan.

#### **2. Manfaat Praktis**

- a. Untuk memberikan tambahan informasi dan pengetahuan tentang penanggulangan peredaran gelap narkoba melalui sungai di wilayah hukum Provinsi Kalimantan Selatan.
- b. Manfaat bagi Masyarakat, yaitu supaya masyarakat menyadari bahwa tindak pidana narkoba sangat berbahaya oleh karena itu masyarakat harus ikut serta dalam memberantas peredaran gelap narkoba melalui sungai di Kalimantan Selatan.
- c. Manfaat bagi penulis , yaitu memahami bentuk penanggulangan dan kendala yang dihadapi dalam melakukan upaya peredaran gelap narkoba melalui sungai di Provinsi Kalimantan Selatan.

### **E. Keaslian Penelitian**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan hukum ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan hasil plagiasi maupun duplikasi dari hasil karya penulis lain, maka dengan ini penulis melampirkan hasil karya penulis lain yang mempunyai kemiripan tetapi berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis.

1. a. Judul : Penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Temanggung.
- b. Penulis : Resika Siboro ( 100510472 ), Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta.
- c. Rumusan Masalah :
  - 1) Bagaimanakah upaya yang dilakukan aparat penegak hukum Kabupaten Temanggung dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba?
  - 2) Apa kendala yang dihadapi dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Temanggung?
- d. Tujuan Penelitian :
  - 1) Mengetahui dan memperoleh data tentang penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Temanggung.
  - 2) Mengetahui kendala yang dihadapi dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Temanggung.

e. Hasil Penelitian :

- 1) Penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Temanggung dilakukan melalui upaya pencegahan dan penegakan hukum. Upaya pencegahan dilaksanakan oleh Sat Resnarkoba Polres Temanggung dan BNNK Temanggung. Sat Resnarkoba Polres Temanggung melakukan pencegahan melalui tindakan preemtif dan tindakan preventif, sedangkan BNNK Temanggung melakukan pencegahan melalui pelaksanaan fungsi pencegahan dan fungsi pemberdayaan. Upaya penegakan hukum atau tindakan represif dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu polisi, jaksa dan hakim. Penegakannya dilakukan sesuai dengan fungsi dan wewenang dari masing masing lembaga.
- 2) Kendali yang dihadapi dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Temanggung, yaitu : oleh Sat Resnarkoba Polres Temanggung ialah kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal berasal dari kepolisian Sat Resnarkoba Polres Temanggung dan kendala eksternal berasal dari masyarakat. Kendala yang dihadapi oleh BNNK Temanggung ialah tidak adanya kesadaran dari pengguna untuk melapor serta belum adanya sarana prasarana seperti laboratorium, hal ini karena BNNK Temanggung masih baru didirikan sedangkan Kejaksaan dan hakim di Pengadilan Negeri Temanggung tidak memiliki kendala selama ini.

2. a. Judul : Polri Dalam Memberantas Tindak Pidana Narkotika di Provinsi  
DIY.
- b. Penulis : David Brain Kasidy Marpaung ( 070509759 ) Fakultas  
Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- c. Rumusan Masalah :
  - 1) Bagaimana implementasi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam memberantas tindak pidana narkotika di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?
  - 2) Apa kendala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam memberantas tindak pidana narkotika di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?
- d. Tujuan Penelitian :
  - 1) Untuk memperoleh data mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menanggulangi tindak pidana narkotika wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
  - 2) Untuk memperoleh data mengenai kendala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan memberantas tindak pidana narkotika di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- e. Hasil Penelitian :
  - 1) Upaya Polda DIY pada praktek lapangan :
    - a) *Mapping data* adalah pemetaan atau daerah tempat narkotika yang bersangkutan, contohnya di daerah Seturan, Sleman, DIY.

- b) Melakukan kordinasi dengan pihak terkait Badan Narkotika Provinsi : berfungsi untuk bekerjasama dalam penyidikan, lembaga kemasyarakatan: berfungsi untuk pembinaan atau rehabilitasi bagi narapina penyalahgunaan narkotika, Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes): berfungsi untuk menentukan seseorang pengguna narkotika atau tidak, dengan pemeriksaan *urine* pada tersangka, Balai POM: berfungsi untuk pemeriksaan laboratorium atau jenis narkotika khusus untuk instansi pemerinta selain Polri, Labfor Polri: berfungsi untuk pemeriksa laboratoris atau jenis narkotika khusu anggota Polri, Bea Cukai berfungsi untuk mengantisipasi penyeludukan narkotika melalui jalur darat, udara dan laut, Imigrasi: berfungsi untuk melakukan pemeriksaan data atau identitas (termasuk paspor).
- c) Membuat MOU dengan perusahaan telekomunikasi sesuai dengan pasal 86 ayat (2) UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- d) Melakukan penggalangan kepada masyarakat dengan tujuan untuk memberikan atau membantu informasi tentang penggunaan narkoba.

Upaya Polda DIY dalam keseluruhan, terdiri dari :

- 1) Preemptif : Penyuluhan atau sosialisasi tentang bahaya narkoba, pemasangan spanduk dan pamphlet ; penyuluhan atau sosialisasi tentang bahaya narkoba ini dilakukan penyuluhan-penyuluhan dari tingkat SMP, SMA sampai Perguruan tinggi beserta instansi pemerintah (karyawan-karyawan kantor yang berada di Polda DIY).
- 2) Preventif : Razia (ditempat hiburan) atau pencurian kendaraan bermotor di pintu masuk wilayah Provinsi DIY.
- 3) Represif : Pengungkapanj kasus-kasus narkoba (Penyelidikan dan Penyidikan).

Kendala Polda DIY dalam memberantas tindak pidana narkoba di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta :

- 1) Kurangnya jumlah sarana dan prasarana.
- 2) Masih kurangnya kesadaran masyarakat atau takut dalam melaporkan adanya tindak pidana narkoba kepada Ditresnarkoba Polda DIY.



## **G. Batasan Konsep**

### **1. Upaya**

Usaha atau ikhtiar yang dilakukan untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar dan sebagainya.<sup>7</sup>

### **2. Kepolisian Negara Republik Indonesia**

Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada pasal 5 adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

### **3. Penanggulangan**

Penanggulangan adalah proses, cara, perbuatan menanggulangi.<sup>8</sup>  
Menanggulangi merupakan menghadapi, mengatasi.<sup>9</sup>

### **4. Peredaran Gelap Narkotika**

Pengertian peredaran gelap narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika prekursor narkotika.

---

<sup>7</sup> <http://kamusbahasaIndonesia.org/upaya/mirip> diakses pada tanggal 10 maret 2015

<sup>8</sup> *KBBI Pusat Bahasa, Edisi Keempat*, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, 2012, Hlm. 1397.

<sup>9</sup> *Ibid*

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian yang dilakukan/berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan.

### **2. Sumber data**

Dalam penelitian hukum normatif data berupa data sekunder, terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer: berupa peraturan perundang-undangan yang tata urutannya sesuai dengan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada penelitian ini peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 ).
- b. Bahan hukum sekunder: berupa fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum, dan pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, internet dan majalah ilmiah.

### **3. Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan dengan cara:

#### **a. Studi kepustakaan**

Studi kepustakaan adalah dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

- b. Wawancara dengan narasumber tentang obyek yang diteliti.

#### 4. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian yang dipilih dalam penulisan hukum ini adalah Polda Kalimantan Selatan

#### 5. Narasumber

Narasumber adalah subyek atau seseorang yang berkapasitas sebagai ahli, professional atau pejabat yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti berdasarkan pedoman wawancara berupa pendapat hukum terkait dengan rumusan masalah hukum yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan narasumber dari institusi Polda Kalimantan Selatan. Pada penelitian ini yang menjadi narasumber penulis adalah bapak AKBP. Agus Durijanto, S.H., M.H, AKP. Charles Tampubolon, S.H., S.IK, Bripka Subroto Rindang A.S, dan Bripka Ajang Sudrajat.

#### 6. Analisis Data

Analisis data dilakukan terhadap:

- a) Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, sesuai 5 tugas ilmu hukum normatif, yaitu deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif.
- b) Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum yang diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber.

- c) Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diperbandingkan dan dicari ada tidaknya kesenjangan.

## **I. Sistematika Isi Skripsi**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika skripsi.

### **BAB II Peredaran Gelap Narkotika Di Provinsi Kalimantan Selatan Dan Upaya Penanggulangannya.**

Bab ini berisi tinjauan umum tentang narkotika, tugas dan wewenang Polri dalam penanggulangan peredaran gelap narkotika, dan penanggulangan peredaran gelap narkotika oleh Polda Kalsel.

### **BAB III PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan berdasarkan dari hasil penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dan saran yang diajukan berdasarkan berdasarkan temuan persoalan dalam penelitian hukum ini.

## BAB II

### PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DI PROVINSI KALIMANTAN

#### SELATAN DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Narkotika Dan Kepolisian

##### 1. Pengertian narkotika

Secara etimologis narkotika berasal dari bahasa Yunani, yaitu *narke* atau *narkam* yang berarti membuat lumpuh atau mati rasa. Dalam bahasa Inggris narkotika disebut *narcose* atau *narcotic* artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek *stupor* (bengong), bahan-bahan pembius dan obat bius.

Secara terminologi, dalam kamus besar Bahasa Indonesia narkotik atau narkotika adalah obat untuk menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang.<sup>10</sup> Pengertian narkotika juga dapat dilihat dalam Ensikolopedia Nasional Indonesia, narkotika diartikan sebagai sekelompok zat yang dapat menimbulkan kecanduan (adiksi). Senyawa ini dapat berasal dari tumbuhan yang mengandung alkaloid candu, atau di laboratorium secara semisintetis atau sintetis.<sup>11</sup> Di samping pengertian-pengertian di atas, pengertian narkotika juga diuraikan oleh beberapa sarjana hukum Indonesia, seperti Soedjono Dirjdosiswono, berpendapat bahwa narkotika adalah zat yang bisa menimbulkan pengaruh-pengaruh berupa

---

<sup>10</sup> KBBI Pusat Bahasa, Edisi Keempat, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, 2012, Hlm.952.

<sup>11</sup> Ensikolopedia Nasional Indonesia, jilid 11, PT. Cipta Adi Pustaka, Jakarta, 1991, Hlm.27.

pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan timbulnya khayalan-khayalan bagi mereka yang menggunakan dengan memasukkannya ke dalam tubuh,<sup>12</sup> sedangkan menurut Elijah Adams memberikan definisi narkotika adalah sebagai berikut, “Narkotika adalah : terdiri dari zat sintesis dan semi sintesis yang terkenal adalah heroin yang terbuat dari *morphine* yang tidak dipergunakan, tetapi banyak nampak dalam perdagangan – perdagangan gelap, selain juga terkenal istilah *dihydro morphine*.<sup>13</sup>

## 2. Penggolongan narkotika

Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, narkotika dibedakan dalam beberapa golongan sebagai berikut:

### a. Narkotika golongan I

Narkotika golongan satu hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, yang termasuk narkotika golongan I adalah sebagai berikut:<sup>14</sup>

1. Tanaman *Papaver Somniferum* L dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.

---

<sup>12</sup> Soedjono Dirdjosiswono, *Hukum Narkotika Indonesia*, cetakan II, Penerbit Citra Aditya Bakti, 1990, Hlm.3.

<sup>13</sup> Wison Nadack, *Korban Ganja dan Masalah Narkotika*, Indonesia Publishing House, Bandung, 1983. hal. 122.

<sup>14</sup> <http://bnnp-diy.com/posting-94-jenisjenis-narkotika-menurut-undang-undang-no-35-tahun-2009.html>. Diakses pada tanggal 9 maret 2015.

2. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum L* yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfinnya.
3. Opium masak terdiri dari :
  - 1) Candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemadatan.
  - 2) Jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
  - 3) Jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.
  - 4) Tanaman koka, tanaman dari semua genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya.
  - 5) Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
  - 6) Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.
  - 7) Kokaina, metil ester-1-bensoil ekgonina.

- 8) Tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.
- 9) Tetrahydrocannabinol, dan semua isomer serta semua bentuk stereo kimianya.
- 10) Delta 9 tetrahydrocannabinol, dan semua bentuk stereo kimianya.
- 11) Asetorfina : 3-O-acetiltetrahydro-7 $\alpha$ -(1-hidroksi-1-metilbutil)-6, 14-endoeteno-oripavina.
- 12) Acetil – alfa – metil fentanil N-[1-( $\alpha$ -metilfenetil)-4-piperidil] asetanilida.
- 13) Alfa-metilfentanil : N-[1 ( $\alpha$ -metilfenetil)-4-piperidil] propionanilida.
- 14) Alfa-metiltiofentanil : N-[1-] 1-metil-2-(2-tienil) etil]-4-iperidil] priopionanilida.
- 15) Beta-hidroksifentanil : N-[1-(beta-hidroksifenetil)-4-piperidil] propionanilida.
- 16) Beta-hidroksi-3-metil-fentanil : N-[1-(beta-hidroksifenetil)-3-metil-4 piperidil] propio-nanilida.
- 17) Desmorfina : Dihidrodeoksimorfina.
- 18) Etorfina : tetrahydro-7 $\alpha$ -(1-hidroksi-1-metilbutil)-6, 14-endoeteno-oripavina.
- 19) Heroina : Diacetilmorfina.
- 20) Ketobemidona : 4-meta-hidroksifenil-1-metil-4propionilpiperidina.
- 21) 3-metilfentanil : N-(3-metil-1-fenetil-4-piperidil) propionanilida.



- 22) 3-metiltiofentanil : N-[3-metil-1-[2-(2-tienil) etil]-4-piperidil] propionanilida.
- 23) MPPP : 1-metil-4-fenil-4-piperidinol propianat (ester).
- 24) Para-fluorofentanil : 4'-fluoro-N-(1-fenetil-4-piperidil) propionanilida.
- 25) PEPAP : 1-fenetil-4-fenil-4-piperidinolasetat (ester).
- 26) Tiofentanil : N-[1-[2-(2-tienil)etil]-4-piperidil] propionanilida.
- 27) BROLAMFETAMINA, nama lain : ( $\pm$ )-4-bromo-2,5-dimetoksi-  $\alpha$  - metilfenetilamina DOB.
- 28) DET : 3-[2-( dietilamino )etil] indol.
- 29) DMA : ( + )-2,5-dimetoksi-  $\alpha$  -metilfenetilamina.
- 30) DMHP : 3-(1 ,2-dimetilheptil)-7 ,8,9, 10-tetrahidro-6,6,9-trimetil-6H-dibenzo[b, d]piran-1-ol.
- 31) DMT : 3-[2-( dimetilamino )etil] indol.
- 32) DOET : ( $\pm$ )-4-etil-2,5-dimetoksi-  $\alpha$  –metilfenetilamina.
- 33) ETISIKLIDINA, nama lain PCE : N-etil-1-fenilsikloheksilamina.
- 34) ETRIPTAMINA. : 3-(2aminobutil) indole.
- 35) KATINONA : (-)-(S)- 2-aminopropiofenon.
- 36) ( + )-LISERGIDA, nama lain : 9,10-didehidro-N, N-dietil-6-metilergolina-8  $\beta$  – LSD, LSD-25 karboksamida.
- 37) MDMA : ( $\pm$ )-N,  $\alpha$  -dimetil-3,4-(metilendioksi)fenetilamina.
- 38) Meskalina : 3,4,5-trimetoksifenetilamina.
- 39) METKATINONA : 2-(metilamino )-1- fenilpropan-1-on.

- 40) 4- metilaminoreks : ( $\pm$ )-sis- 2-amino-4-metil- 5- fenil- 2-oksazolina.
- 41) MMDA : 5-metoksi-  $\alpha$  -metil-3,4-(metilendioksi)fenetilamina.
- 42) N-etil MDA : ( $\pm$ )-N-etil-  $\alpha$  -metil-3,4-(metilendioksi)fenetilamin.
- 43) N-hidroksi MDA : ( $\pm$ )-N-[  $\alpha$  -metil-3,4-(metilendioksi)fenetil]hidroksilamina.
- 44) Paraheksil : 3-heksil-7,8,9, 10-tetrahidro-6,6, 9-trimetil-6H-dibenzo [b,d]piran-1-ol.
- 45) PMA : p-metoksi-  $\alpha$  -metilfenetilamina.
- 46) psilosina, psilotsin : 3-[2-( dimetilamino )etil]indol-4-ol.
- 47) PSILOSIBINA : 3-[2-(dimetilamino)etil]indol-4-il dihidrogen fosfat.
- 48) ROLISIKLIDINA, nama lain : 1-( 1- fenilsikloheksil)pirolidina PHP,PCPY.
- 49) STP, DOM : 2,5-dimetoksi-  $\alpha$  ,4-dimetilfenetilamina.
- 50) TENAMFETAMINA, nama lain :  $\alpha$  -metil-3,4-(metilendioksi)fenetilamina MDA.
- 51) TENOSIKLIDINA, nama lain : 1- [1-(2-tienil) sikloheksil]piperidina TCP.
- 52) TMA : ( $\pm$ )-3,4,5-trimetoksi-  $\alpha$  -metilfenetilamina.
- 53) AMFETAMINA : ( $\pm$ )-  $\alpha$  –metilfenetilamina.
- 54) DEKSAMFETAMINA : ( + )-  $\alpha$  –metilfenetilamina.
- 55) FENETILINA : 7-[2-[(  $\alpha$  -metilfenetil)amino]etil]teofilina.
- 56) FENMETRAZINA : 3- metil- 2 fenilmorfolin.
- 57) FENSIKLIDINA, nama lain PCP : 1-( 1- fenilsikloheksil)piperidina.

58) LEVAMFETAMINA, nama lain : ( - )-(R)-  $\alpha$  -metilfenetilamina  
levamfetamina.

59) Levometamfetamina : ( -)- N,  $\alpha$  -dimetilfenetilamina.

60) MEKLOKUALON : 3-( o-klorofenil)- 2-metil-4(3H)- kuinazolinon.

61) METAMFETAMINA : ( + )-(S)-N,  $\alpha$  -dimetilfenetilamina.

62) METAKUALON : 2- metil- 3-o-to lil-4(3H)- kuinazolinon.

63) ZIPEPPROL :  $\alpha$  - (  $\alpha$  metoksibenzil)-4-(  $\beta$ -metoksifenetil )-1-  
piperazinetano.

64) Opium Obat.

65) Campuran atau sediaan opium obat dengan bahan lain bukan narkotika.

#### b. Narkotika golongan II

Narkotika golongan dua, berkhasiat untuk pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan, yang termasuk narkotika golongan II adalah sebagai berikut:

1. Alfasetilmetadol : Alfa-3-asetoksi-6-dimetil amino-4,4-difenilheptana.
2. Alfameprodina : Alfa-3-etil-1-metil-4-fenil-4-propionoksipiperidina.
3. Alfametadol : alfa-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol.
4. Alfaprodina : alfa-1, 3-dimetil-4-fenil-4-propionoksipiperidina.
5. Alfentanil : N-[1-[2-(4-etil-4,5-dihidro-5-okso-1 H-tetrazol-1-il)etil]-4-(metoksimetil)-4-piperidinil]-N-fenilpropanamida.

6. Allilprodina : 3-allil-1-metil-4-fenil-4-propionoksipiperidina.
7. Anileridina : Asam 1-(para-aminofenetil-4-fenilpiperidina)-4-karboksilat etil ester.
8. Asetilmetadol : 3-asetoksi-6-dimetilamino-4, 4-difenilheptana.
9. Benzetidin : asam 1-(2-benziloksietil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester.
10. Benzilmorfina : 3-benzilmorfina.
11. Betameprodina : beta-3-etil-1-metil-4-fenil-4-propionoksipiperidina.
12. Betametadol : beta-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol.
13. Betaprodina : beta-1,3-dimetil-4-fenil-4-propionoksipiperidina.
14. Betasetilmetadol : beta-3-asetoksi-6-dimetilamino-4, 4-difenilheptana.
15. Bezitramida : 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4-(2-okso-3-propionil-1-benzimidazolinil)-piperidina.
16. Dekstromoramida : (+)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(1-pirolidinil)butil]-morfolina.
17. Diampromida : N-[2-(metilfenetilamino)-propil]propionanilida.
18. Dietiltiambutena : 3-dietilamino-1,1-di(2'-tienil)-1-butena.
19. Difenoksilat : asam 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester.
20. Difenoksin : asam 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4-fenilisonipekotik.  
Dihidromorfina.
21. Dimefheptanol : 6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol.

22. Dimenoksadol : 2-dimetilaminoetil-1-etoksi-1,1-difenilasetat.
23. Dimetiltiambutena : 3-dimetilamino-1,1-di-(2'-tienil)-1-butena.
24. Dioksafetil butirat : etil-4-morfolino-2, 2-difenilbutirat.
25. Dipipanona : 4, 4-difenil-6-piperidina-3-heptanona.
26. Drotebanol : 3,4-dimetoksi-17-metilmorfinan-6 $\beta$ ,14-diol.
27. Ekgonina, termasuk ester dan derivatnya yang setara dengan ekgonina dan kokaina.
28. Etilmetiltiambutena : 3-etilmetilamino-1, 1-di-(2'-tienil)-1-butena.
29. Etokseridina : asam 1-[2-(2-hidroksietoksi)-etil]-4fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester.
30. Etonitazena : 1-dietilaminoetil-2-para-etoksibenzil-5nitrobenzimidazol.
31. Furetidina : asam 1-(2-tetrahidrofurfuriloksietil)4 fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester).
32. Hidrokodona : dihidrokodeinona.
33. Hidroksipetidina : asam 4-meta-hidroksifenil-1-metilpiperidina-4-karboksilat etil ester .
34. Hidromorfinol : 14-hidroksidihidromorfina.
35. Hidromorfona : dihidrimorfinona.
36. Isometadona : 6-dimetilamino- 5 -metil-4, 4-difenil-3-heksanona.
37. Fenadoksona : 6-morfolino-4, 4-difenil-3-heptanona.
38. Fenampromida : N-(1-metil-2-piperidinoetil)-propionanilida.
39. Fenazosina : 2'-hidroksi-5,9-dimetil- 2-fenetil-6,7-benzomorfan.

40. Fenomorfana : 3-hidroksi-N-fenetilmorfina.
41. Fenoperidina : asam 1-(3-hidroksi-3-fenilpropil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat Etil ester.
42. Fentanil : 1-fenetil-4-N-propionil-anilinopiperidina.
43. Klonitazena : 2-para-klorbenzil-1-dietilaminoetil-5-nitrobenzimidazol.
44. Kodoksima : dihidrokodeinona-6-karboksimetiloksima.
45. Levofenasilmorfana : (1)-3-hidroksi-N-fenasilmorfina.
46. Levomoramida : (-)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(1-pirolidinil)butil]morfolina.
47. Levometorfana : (-)-3-metoksi-N-metilmorfina.
48. Levorfanol : (-)-3-hidroksi-N-metilmorfina.
49. Metadona : 6-dimetilamino-4, 4-difenil-3-heptanona.
50. Metadona intermediate : 4-siano-2-dimetilamino-4, 4-difenilbutana.
51. Metazosina : 2'-hidroksi-2,5,9-trimetil-6, 7-benzomorfana.
52. Metildesorfina : 6-metil-delta-6-deoksimorfina.
53. Metildihidromorfina : 6-metildihidromorfina.
54. Metopon : 5-metildihidromorfina.
55. Mirofina : Miristilbenzilmorfina.
56. Moramida intermediate : asam (2-metil-3-morfolino-1, 1-difenilpropana karboksilat.
57. Morferidina : asam 1-(2-morfolinoetil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester.

58. Morfina-N-oksida.
59. Morfin metobromida dan turunan morfina nitrogen pentafalent lainnya termasuk bagian turunan morfina-N-oksida, salah satunya kodeina-N-oksida.
60. Morfina.
61. Nikomorfina : 3,6-dinikotinilmorfina.
62. Norasimetadol : ( $\pm$ )-alfa-3-asetoksi-6metilamino-4,4-difenilheptana.
63. Norlevorfanol : (-)-3-hidroksimorfinan.
64. Normetadona : 6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heksanona.
65. Normorfina : dimetilmorfina atau N-demetilatedmorfina.
66. Norpipanona : 4,4-difenil-6-piperidino-3-heksanona.
67. Oksikodona : 14-hidroksidihidrokodeinona.
68. Oksimorfona : 14-hidroksidihidromorfinona.
69. Petidina intermediat A : 4-siano-1-metil-4-fenilpiperidina.
70. Petidina intermediat B : asam4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester.
71. Petidina intermediat C : Asam1-metil-4-fenilpiperidina-4-karboksilat.
72. Petidina : Asam1-metil-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester.
73. Piminodina : asam 4-fenil-1-( 3-fenilaminopropil)- pipe ridina-4-karboksilat etil ester.
74. Piritramida : asam1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4(1-piperidino)-piperdina-4-Karbositat armida.
75. Proheptasina : 1,3-dimetil-4-fenil-4-propionoksiazasikloheptana.

76. Properidina : asam 1-metil-4-fenilpiperidina-4-karboksilat isopropil ester.
77. Rasemeterfan : ( $\pm$ )-3-metoksi-N-metilmorfinan.
78. Rasemoramida : ( $\pm$ )-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(1-pirolidinil)-butil]-morfolina.
79. Rasemorfan : ( $\pm$ )-3-hidroksi-N-metilmorfinan.
80. Sufentanil : N-[4-(metoksimetil)-1-[2-(2-tienil)-etil -4-piperidil] propionanilida.
81. Tebaina.
82. Tebakon : asetildihidrokodeinona.
83. Tilidina : ( $\pm$ )-etil-trans-2-(dimetilamino)-1-fenil-3-sikloheksena-1-karboksilat.
84. Trimeperidina : 1,2,5-trimetil-4-fenil-4-propionoksipiperidina.
85. Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut di atas.

c. Narkotika golongan III

Narkotika golongan tiga, berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan, yang termasuk narkotika golongan III adalah sebagai berikut:

1. Asetildihidrokodeina.
2. Dekstropropoksifena :  $\alpha$ -(+)-4-dimetilamino-1,2-difenil-3-metil-2-butanol propionat.
3. Dihidrokodeina.



4. Etilmorfina : 3-etil morfina.
5. Kodeina : 3-metil morfina.
6. Nikodikodina : 6-nikotinildihidrokodeina.
7. Nikokodina : 6-nikotinilkodeina.
8. Norkodeina : N-demetilkodeina.
9. Polkodina : Morfoliniletilmorfina.
10. Propiram : N-(1-metil-2-piperidinoetil)-N-2-piridilpropionamida.
11. Buprenorfina : 21-siklopropil-7- $\alpha$ -[(S)-1-hidroksi-1,2,2-trimetilpropil]-6,14-endo-entano-6,7,8,14- tetrahidrooripavina.
12. Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut diatas.
13. Campuran atau sediaan difenoksin dengan bahan lain bukan narkotika.
14. Campuran atau sediaan difenoksilat dengan bahan lain bukan narkotika.

### **3. Dampak negatif penyalahgunaan narkotika.**

Narkotika dan obat terlarang serta zat adiktif/psikotropika dapat menyebabkan efek dan dampak negatif bagi pemakainya. Dampak penyalahgunaan narkotika pada seseorang sangat tergantung pada jenis narkoba yang dipakai, kepribadian pemakai dan situasi atau kondisi pemakai. Secara umum, dampak kecanduan narkoba dapat terlihat pada fisik, psikis maupun sosial

seseorang,<sup>15</sup> oleh karena itu obat dan narkotik yang disalahgunakan dapat menimbulkan berbagai akibat yang beraneka ragam.<sup>16</sup>

#### 1. Dampak tidak langsung narkotika yang disalahgunakan

- a) Akan banyak uang yang dibutuhkan untuk penyembuhan dan perawatan kesehatan pecandu jika tubuhnya rusak digerogoti zat beracun.
- b) Dikucilkan dalam masyarakat dan pergaulan orang baik-baik. Selain itu biasanya tukang candu narkoba akan bersikap anti sosial.
- c) Keluarga akan malu besar karena punya anggota keluarga yang memakai zat terlarang.
- d) Kesempatan belajar hilang dan mungkin dapat dikeluarkan dari sekolah atau perguruan tinggi alias DO / drop out.
- e) Tidak dipercaya lagi oleh orang lain karena umumnya pecandu narkoba akan gemar berbohong dan melakukan tindak kriminal.
- f) Dosa akan terus bertambah karena lupa akan kewajiban Tuhan serta menjalani kehidupan yang dilarang oleh ajaran agamanya.
- g) Bisa dijejaskan ke dalam tembok derita / penjara yang sangat menyiksa lahir batin.

---

<sup>15</sup> Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar maju, Bandung, 2003. Hal 29-30.

<sup>16</sup> Moh. Taufik Makarao, Suhasril, H. Moh Zakky A.S., *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, 2003, Jakarta, Hlm.12.

- h) Narkoba akan merubah kepribadian dan karakter si korban secara dratis. Contohnya menjadi pemurung, pemaarah, melawan, serta durhaka kepada orang tua.
- i) Menimbulkan sifat masa bodoh sekalipun terhadap dirinya seperti tidak lagi memperhatikan pakaian, tempat tidur dan sebagainya, hilangnya ingatan, dada nyeri dan dikejar rasa takut.
- j) Semangat belajar menurun dan suatu ketika bisa saja si korban bersifat seperti orang gila karena reaksi dari penggunaan narkoba.
- k) Tidak lagi ragu untuk mengadakan hubungan seks karena pandangannya terhadap norma-norma masyarakat, adat kebudayaan, serta nilai-nilai agama sangat longgar. Dorongan seksnya menjadi brutal, maka terjadilah kasus-kasus pemerkosaan.
- l) Tidak segan-segan menyiksa diri karena ingin menghilangkan rasa nyeri atau menghilangkan sifat ketergantungan terhadap obat bius, ingin mati bunuh diri.
- m) Bagi anak-anak sekolah, prestasi belajarnya akan menurun karena banyak berkhayal dan berangan-angan sehingga merusak kesehatan dan mental.
- n) Memicu timbulnya pemerkosaan dan seks bebas yang akhirnya terjebak dalam perzinahan dan selanjutnya mengalami penyakit HIV atau AIDS.

## 2. Dampak langsung narkoba bagi jasman/tubuh manusia

- a) Gangguan pada jantung
- b) Gangguan pada hemoprosik
- c) Gangguan pada traktur urinarius

- d) Gangguan pada otak
- e) Gangguan pada tulang
- f) Gangguan pada pembuluh darah
- g) Gangguan pada endorin
- h) Gangguan pada kulit
- i) Gangguan pada sistem syaraf
- j) Gangguan pada paru-paru
- k) Gangguan pada sistem pencernaan
- l) Dapat terinfeksi penyakit menular berbahaya seperti HIV AIDS, Hepatitis, Herpes, TBC, dll.
- m) Dan banyak dampak lainnya yang merugikan badan manusia.

3. Dampak langsung narkoba bagi kejiwaan/mental manusia

- a) Menyebabkan depresi mental.
- b) Menyebabkan gangguan jiwa berat / psikotik.
- c) Menyebabkan bunuh diri
- d) Menyebabkan melakukan tindak kejahatan, kekerasan dan pengrusakan.

4. Bahaya bagi bangsa dan negara

- a) Rusaknya pewaris bangsa yang seyogyanya siap untuk menerima tongkat estafet kepemimpinan bangsa.
- b) Hilangnya rasa patriotisme atau rasa cinta bangsa yang pada gilirannya mudah untuk di kuasai oleh bangsa asing.

- c) Penyeludupan akan meningkat padahal penyeludupan dalam bentuk apapun adalah merugikan negara.
- d) Pada akhirnya bangsa dan negara kehilangan identitas yang disebabkan karena perubahan nilai budaya.

**4. Tanda-tanda pemakai narkotika:<sup>17</sup>**

- a. Ada kesulitan konsentrasi dan penurunan daya ingat.
- b. Kurang memperhatikan penampilan dan kerapian.
- c. Kedapatan berbicara cadel atau gugup (sebelumnya gejala ini tidak pernah muncul).
- d. Ada perubahan pola tidur (pagi hari sulit dibangunkan dan malam hari sering mengeluh susah tidur).
- e. Sering didapatkan mata merah dan hidung berair (walau tidak sedang influenza)
- f. Perubahan tingkah laku terhadap orang-orang disekitarnya menjadi lebih kasar, tidak sopan dan penuh rahasia serta jadi mudah curiga terhadap orang lain.
- g. Marah yang tidak terkontrol yang tidak biasanya dan perubahan suasana hati yang tiba-tiba.
- h. Meminjam atau mencuri uang.

---

<sup>17</sup> Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Rajawali Pers. Jakarta. 2008. Hlm 96-98.

- i. Menggunakan kaca mata gelap pada saat yang tidak tepat untuk menyembunyikan mata merah dan bengkak.
- j. Bersembunyi di kamar mandi atau tempat-tempat yang janggal seperti gudang, dibawah tangga dalam waktu lama dan berkali-kali.
- k. Lebih banyak menyendiri dari biasanya, sering bengong dan berhalusinasi.
- l. menjadi suka berbohong.
- m. Berat badan turun karna nafsu makan tidak menentu.

## **5. Peredaran gelap narkotika**

Berdasarkan perbuatannya tindak pidana narkotika terdiri dari beberapa bentuk sebagai berikut:

- a. Kejahatan yang menyangkut produksi narkotika.
- b. Kejahatan yang menyangkut pengangkutan dan transito narkotika.
- c. Kejahatan yang menyangkut jual beli narkotika.
- d. Kejahatan yang menyangkut penguasaan narkotika.
- e. Kejahatan yang menyangkut penyalahgunaan narkotika.
- f. Kejahatan yang menyangkut tidak melaporkan kejahatan narkotika.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Tindak pidana narkotika dapat dirumuskan sebagai *crime without victim*, dimana para pelaku juga berperan sebagai korban. Menurut Hj. Tutty Alawiyah A.S dalam

Moh. Taufik Makarao dkk menyebut, tindak pidana atau kejahatan narkoba adalah merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dikenal sebagai kejahatan tanpa korban (*Victimless Crime*). Selain narkoba, yang termasuk kejahatan tanpa korban adalah perjudian, minuman keras, pornografi, dan prostitusi.<sup>18</sup>

Dalam tindak pidana narkoba selain tindak pidana peredaran gelap, ada juga tindak pidana penyalahgunaan narkoba, secara umum mereka yang menyalahgunakan narkoba dapat di bagi dalam tiga golongan besar, yaitu:<sup>19</sup>

- a. Ketergantungan primer, ditandai dengan adanya kecemasan dan depresi, yang pada umumnya terdapat pada orang dengan kepribadian yang pada umumnya terdapat pada orang dengan kepribadian yang tidak sama sekali.
- b. Ketergantungan simptomatis, yaitu penyalahgunaan narkoba sebagai salah satu gejala dari tipe kepribadian yang mendasarinya, pada umumnya terjadi pada orang dengan kepribadian psikopatik (antisosial), kriminal dan pemakaian narkoba untuk kesenangan semata.
- c. Ketergantungan reaktif, yaitu (terutama) terdapat pada remaja karena dorongan ingin tahu, pengaruh lingkungan dan tekanan teman kelompok sebaya.

---

<sup>18</sup> Moh. Taufik Makarao, Suhasril, H. Moh Zakky A.S, *Tindak Pidana Narkoba*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hal, 8

<sup>19</sup> *Ibid.* Hlm 101

Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana banyak terjadi pada anak-anak usia sekolah maupun remaja. Mereka masih begitu mudah terpengaruh dan kondisi jiwa mereka yang masih belum stabil, ini juga banyak terjadi diberbagai kota yang sedang berkembang dan giat-giatnya membangun.<sup>20</sup>

#### **B. Tugas Dan Wewenang Polri Dalam Penanggulangan Peredaran Gelap Narkotika**

Dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum perlu dikaitkan instansi terkait yang mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan kegiatan instansi/departemen yang terkait dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika di bidang penegakan hukum. Penegakan hukum terhadap perkembangan tindak pidana narkotika dengan modus operandi dan dengan mempergunakan teknologi canggih harus diantisipasi dengan peningkatan kualitas penegak hukum dan kelengkapan perangkat hukum serta tatanan hukum yang dilandaskan kepada pandangan bahwa masyarakat nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan masyarakat internasional, sehingga bertitik tolak pada pandangan tersebut, konsep penegakkan hukum yang tidak hanya mengutamakan kepentingan untuk melindungi masyarakat nasional, melainkan juga memperhatikan kepentingan perlindungan masyarakat internasional.

---

<sup>20</sup> Andi Hamzah, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994. Hal 33



### 1. Pengertian Polisi

Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 angka 1 menyatakan Kepolisian adalah segala hal-ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Polisi adalah badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya).

### 2. Fungsi Polisi

Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

### 3. Tugas dan wewenang polisi

Tugas polisi secara umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a) Memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat
- b) Menegakkan hokum
- c) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat ( Pasal 13 Undang – Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ).

Untuk mendukung tugas pokok tersebut di atas, Polisi juga memiliki tugas-tugas tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

- a) Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- c) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- e) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum : melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap Kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- f) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- g) Melakukan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

- h) Menyelenggarakan identifikasi Kepolisian, kedokteran Kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi Kepolisian untuk kepentingan tugas Kepolisian.
  - i) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan / atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
  - j) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi/ atau pihak berwenang.
  - k) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian.
  - l) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (Pasal 14 ayat (1) Undang – Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia)

### **C. Penanggulangan Peredaran Gelap Narkotika Oleh Polda Kalsel**

Provinsi Kalimantan Selatan Merupakan provinsi yang memiliki wilayah yang sebagian besar wilayahnya terdapat banyak sungai, baik sungai yang termasuk kategori besar maupun kecil. Sungai-sungai tersebut oleh warga masyarakat setempat digunakan sebagai sarana dan prasarana transportasi. Hal ini juga dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang menjadi pelaku peredaran gelap narkotika di Provinsi Kalsel dalam melakukan pengedaran ke tiap-tiap daerah di Provinsi Kalsel.

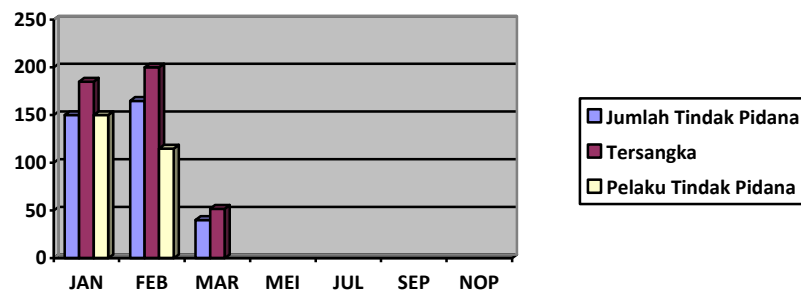
Pelaku tindak pidana narkoba memiliki jaringan yang sangat luas dan tersembunyi, oleh sebab itu pengungkapan kasus tindak pidana narkoba ini memerlukan strategi yang matang dari aparat penegak hukum. Adapun statistik pengungkapan kasus yang berhasil dilakukan oleh Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Kesatuan	Jumlah Tindak Pidana Narkoba tahun 2012-2014		
		2012	2013	2014
1	DITRESNARKOBA	313	343	275
2	RESTA BANJARMASIN	310	293	272
3	RES BANJARBARU	61	106	115
4	RES BANJAR	86	83	122
5	RES TAPIN	35	57	71
6	RES HSS	44	73	67
7	RES HST	31	42	48

8	RES HSU	21	33	43
9	RES BALANGAN	24	26	25
10	RES TABALONG	59	35	46
11	RES TALA	23	41	49
12	RES TANBU	58	79	126
13	RES KOTABARU	80	121	130
14	RES BATOLA	33	35	66
JUMLAH		1178	1367	1455

Sumber : Dit Reserse Narkoba Polda Kalimantan Selatan Tahun 2015

Tabel diatas menunjukan bahwa jumlah pengungkapan kasus paling tinggi di tahun 2014 yakni 1455 kasus sedangkan jumlah paling rendah berada pada tahun 2012 yakni 1178 kasus.



Sumber : Dit Reserse Narkoba Polda Kalimantan Selatan Tahun 2015

Diagram diatas menunjukan jumlah pengungkapan kasus peredaran gelap narkoba pada bulan januari sampai dengan maret di tahun 2015. Dapat dilihat bahwa terjadi penurunan di bulan maret dibandingkan dengan bulan januari dan februari. Penurunan tersebut dikarenakan sulitnya pengungkapan yang dilakukan oleh kepolisian karena semakin tinggi teknologi yang digunakan dalam melakukan peredaran gelap narkoba.

1. Upaya Polda Kalimantan Selatan dalam menanggulangi peredaran gelap narkoba

Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini Polda Kalsel dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba ditangani oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Selatan. Ditrektorat Reserse Narkoba merupakan unsur pelaksana tugas pokok Polda yang berada di bawah Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda). Dalam melaksanakan tugas, Ditresnarkoba menyelenggarakan fungsi : <sup>21</sup>

- a. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
- b. Pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitas korban penyalahgunaan narkoba.
- c. Pengawasan terhadap penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh unit reskrim polsek dan polres.

---

<sup>21</sup> Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Bapak AKBP Agus Durijanto, Pada Tanggal 6 April 2015.

- d. Penganalisisan kasus beserta penanganannya serta mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas sat res narkoba.

Dalam melakukan upaya penanggulangan tindak pidana peredaran gelap narkoba di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, Polda Kalimantan Selatan Melakukan upaya-upaya sebagai berikut:<sup>22</sup>

a. Upaya preventif

Upaya preventif atau upaya non penal adalah upaya pencegahan yang dilakukan oleh Polda Kalimantan Selatan sebelum terjadinya tindak pidana peredaran gelap narkoba.<sup>23</sup>

1) Patroli di sungai

Polisi menelusuri sungai sungai di wilayah provinsi kalsel dengan menggunakan kapal patroli milik polisi perairan terutama pada tempat yang di duga sering menjadi tempat melakukan transaksi jual beli narkoba untuk mencegah terjadinya tindak pidana peredaran gelap narkoba.

2) Penyuluhan

Penyuluhan yang dilakukan oleh polda kalsel berisi tentang dampak dari penggunaan narkoba secara ilegal dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang narkoba. Penyuluhan ini diberikan kepada komunitas-komunitas yang berada di perairan seperti komunitas kelotok servis, pedagang yang menggunakan kelotok, buruh-buruh di pelabuhan dan

---

<sup>22</sup> Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Bapak Subroto Rindang AS, Pada Tanggal 7 April 2015.

<sup>23</sup> Marwan & Jimmy, *Kamus Hukum*, Reality Publiher, 2009, Hlm. 513

masyarakat yang tinggal pinggiran sungai. Penyuluhan dilakukan dengan mengumpulkan orang-orang yang menjadi target dalam penyuluhan.

### 3) Membentuk kampung anti narkoba

Pembentukan kampung anti narkoba dilakukan bertujuan untuk memperkuat kerja sama antara masyarakat dengan kepolisian untuk memberantas peredaran gelap narkoba, karena masyarakat masih enggan melaporkan adanya aktivitas penggunaan maupun peredaran gelap narkoba di lingkungannya, mereka takut di intimidasi maupun dijadikan saksi saat proses hukum berlangsung. Adanya kampung anti narkoba diharapkan tumbuh keberanian masyarakat menentang peredaran gelap narkoba di lingkungannya. Bagi mereka yang berhasil membantu mengungkap peredaran gelap narkoba akan diberikan hadiah oleh kepolisian.<sup>24</sup>

### 4) Pemeriksaan ke kapal-kapal

Kepolisian melakukan pemeriksaan resmi secara berkala ke kapal-kapal besar yang berada di sungai dalam wilayah Provinsi Kalsel untuk menghindari keluar masuknya narkoba secara ilegal melalui kapal-kapal berbendera negara asing maupun yang berbendera indonesia. Dalam hal ini pemeriksaan ke kapal-kapal dilakukan berdasarkan pada *standart operasional prosedure (SOP)* yaitu :

- a. Dilaksanakan setelah kapal berhenti

---

<sup>24</sup> Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Bapak AKP Charles P Tampubolon, Pada Tanggal 8 April 2015.



- b. Menempati posisi lambung kiri/kanan kapal/perahu motor pada jarak aman dengan mengutamakan keamanan personil dan material.
- c. Bila kemungkinan merapat pada lambung kiri/kanan kapal sasaran.
- d. Tim pemeriksa dengan menunjukan surat tugas atau surat perintah segera melaksanakan pemeriksaan terhadap dokumen kapak, ABK, penumpang, muatan atau barang-barang yang dicurigai.

b. Upaya represif

upaya represif atau upaya penal adalah tindakan yang dilakukan setelah terjadi atau upaya penanggulangan yang bersifat penegakan hukum baik bagi penyalahguna maupun pengedar gelap narkoba. Adapun upaya represif yang dilakukan oleh kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan :<sup>25</sup>

1) Penyelidikan

Mengirim penyusup sebagai informan untuk mencari informasi di lingkungan masyarakat yang beraktivitas di sungai. Informasi yang diperoleh digunakan sebagai alat bukti untuk melakukan pengungkapan peredaran gelap narkoba yang terjadi. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan yang diberikan oleh informan yang ditugaskan mengenai keterangan tentang peredaran gelap narkoba.

---

<sup>25</sup> Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Bapak AKP Charles P Tampubolon, Pada Tanggal 8 April 2015.

## 2) Penangkapan

Berdasarkan KUHAP Pasal 18 ayat (1) pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa. Penangkapan dilakukan oleh Polda Kalsel kepada oknum-oknum yang menjadi tersangka pengguna atau pelaku tindak pidana narkoba di wilayah sungai Provinsi Kalsel. Penangkapan dilakukan berdasarkan informasi dari informan yang ditugaskan.

## 3) Penyidikan

Meminta keterangan dari orang yang diduga melakukan peredaran gelap narkoba di sungai, melakukan penyitaan barang bukti yang digunakan untuk melakukan peredaran gelap narkoba seperti, kapal dan benda-benda lainnya. Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang narkoba Pasal 81 penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba berdasarkan undang-undang ini. Penyidik berdasarkan Pasal 7 KUHAP berwenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.

- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
  - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
  - d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
  - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
  - f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang.
  - g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
  - i. Mengadakan penghentian penyidikan.
  - j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab..
2. Kendala yang dihadapi oleh Polda Kalimantan Selatan dalam penanggulangan peredaran gelap narkoba.
- a. Kendala eksternal, merupakan kendala yang dihadapi oleh Polda Kalsel yang berasal dari luar lembaga kepolisian itu sendiri. adapun kendalanya sebagai berikut:<sup>26</sup>
    - 1) Banyaknya pelabuhan-pelabuhan kecil atau tidak resmi di sepanjang sungai. Pelabuhan tersebut banyak terdapat di rumah-rumah penduduk sekitar sungai yang digunakan untuk berlabuh kapal-kapal penduduk

---

<sup>26</sup> Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Bapak Bripka Subroto Rindang AS, Pada Tanggal 6 April 2015.

tetapi tidak menutup kemungkinan digunakan para pengedar gelap narkoba untuk berlabuh.

- 2) Banyaknya anak sungai yang menjadi akses transportasi. Hal tersebut membuat pihak kepolisian sulit melakukan pengawasan.
  - 3) Kurangnya dukungan dari masyarakat pinggir sungai yang sebagian berlatar belakang pendidikan rendah sehingga masyarakat mudah di pengaruhi untuk membantu para pengedar gelap narkoba dalam penyebarannya.
  - 4) Kesulitan perekonomian yang di alami oleh masyarakat pinggiran sungai dan sulitnya mendapatkan pekerjaan membuat mereka mudah dipengaruhi untuk menjadi kurir dengan mendapatkan imbalan sejumlah uang.
  - 5) Kesulitan dalam melakukan *under cover* (penyamaran) ketika mengirimkan penyusup ke dalam kapal yang diduga membawa narkoba, karena untuk dapat masuk kedalam kapal tidak dapat dilakukan dengan bebas tetapi harus disertai dengan surat izin yang sah.
- b. Kendala Internal, merupakan kendala yang dihadapi oleh Polda Kalsel yang berasal dari dalam lembaga kepolisian. Kendala yang dihadapi adalah Kendala teknis yaitu, kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Polda Kalsel dalam melakukan penyergapan terhadap peredaran gelap

narkotika. Sarana dan prasarana yang dimaksud berupa kapal yang akan digunakan untuk melakukan patroli di wilayah sungai.

### **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, untuk menjawab rumusan masalah yang telah diajukan sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam melakukan penanggulangan gelap narkoba, Polda Kalsel melakukan upaya sebagai berikut:
  - a. Upaya preventif, merupakan upaya pencegahan yang dilakukan oleh Polda Kalsel dalam menanggulangi peredaran gelap narkoba dengan melakukan tindakan patroli di sungai, penyuluhan, dan membentuk kampung anti narkoba
  - b. Upaya Represif, merupakan upaya penegakkan hukum yang dilakukan oleh Polda Kalsel dalam menanggulangi peredaran gelap narkoba dengan melakukan tindakan penyelidikan, pemeriksaan kapal-kapal, penangkapan, dan penyelidikan.
2. Kendala yang dihadapi oleh Polda Kalsel dalam menanggulangi peredaran gelap narkoba adalah sebagai berikut:
  - a. Kendala eksternal, merupakan kendala yang dihadapi oleh Polda Kalsel berasal dari luar lembaga kepolisian yang berupa banyaknya pelabuhan-pelabuhan kecil atau tidak resmi disekitaran sungai, banyaknya anak sungai yang dijadikan sarana transportasi, kurangnya dukungan

masyarakat pinggiran sungai, faktor kesulitan perekonomian yang menjadi pendorong masyarakat menjadi kurir narkoba dan kesulitan dalam melakukan penyamaran (*under cover*).

- b. Kendala Internal, merupakan kendala yang dihadapi oleh Polda Kalsel yang berasal dari dalam lembaga kepolisian yang berupa kendala dengan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Polda Kalsel.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada Polda Kalsel sebaiknya lebih meningkatkan intensitas dalam melakukan patroli di wilayah sungai-sungai yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan untuk meminimalisir terjadinya peredaran gelap narkoba yang dilakukan melalui jalur sungai.
2. Kepada Polda Kalsel sebaiknya melakukan penambahan jumlah kapal-kapal kecil maupun besar agar kapal yang dimiliki memadai jumlahnya ketika melakukan patroli di sungai.
3. Kepada dinas sosial Provinsi Kalimantan Selatan sebaiknya melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat yang tinggal di pinggiran sungai untuk meningkatkan derajat perekonomian mereka, sehingga tidak mudah tergiur menjadi kurir narkoba hanya karena alasan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

- Andi Hamzah, 1994, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ensikolopedia Nasional Indonesia, jilid 11, 1991, PT. Cipta Adi Pustaka, Jakarta.
- Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar maju, Bandung.
- Heriady willy, 2005, *Berantas Narkoba Tak Cukup Hanya Bicara – (Tanya Jawab dan Opini)*, UII Press, Yogyakarta.
- Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Marwan & Jimmy, 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publiher.
- Moh. Taufik Makarao, Suhasril, H. Moh Zakky A.S., 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soedjono Dirdjosiswono, 1990, *Hukum Narkotika Indonesia*, cetakan II, Penerbit Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan pertama, CV. Rajawali, Jakarta.
- Wison Nadack, 1983, *Korban Ganja dan Masalah Narkotika*, Indonesia Publishing House, Bandung.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Peraturan Presiden RI No. 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional.



**Kamus**

KBBI Pusat Bahasa, Edisi Keempat, 2012, Penerbit Gramedia Pustaka Utama.

**Website**

<http://antarakalsel.com/berita/18399/kasus-narkoba-di-kalsel-meningkat>.

<http://bnnp-diy.com/posting-94-jenisjenis-narkotika-menurut-undang-undang-no-35-tahun-2009.html>.

<http://kamusbahasaindonesia.org/upaya/mirip>.

<http://sijaka.wordpress.com/2009/12/06/banjarmasin-tingkat-26-peringkat-konsumsi-narkoba/>'.

<http://www.indonesia.travel/id/destination/914/banjarmasin>.

<http://www.menegpp.go.id>.

<http://www.solusihukum.com>